

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik, dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, kompetitif, maju, dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dalam konteks negara ini. Permasalahan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia (Suripto, 2020). Memperbaiki kehidupan adalah tantangan utama dalam pembangunan. Peningkatan kualitas kehidupan membutuhkan pendapatan yang tinggi. Namun, sepertinya pendapatan bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kesejahteraan. Pendidikan, peningkatan standar kesehatan, nutrisi, pemberantasan kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya adalah masalah lain yang tidak kalah penting yang perlu diperjuangkan. Kemiskinan, pembangunan kelautan, pendekatan ekosistem dalam otonomi daerah, pembangunan lingkungan, dan globalisasi adalah tantangan utama dalam pembangunan Indonesia.

Ketika membicarakan pembangunan ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama pembangunan tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi (Djadjuli, 2018). Saat ini, pertumbuhan ekonomi merupakan topik yang sangat penting bagi ekonomi setiap negara; pertumbuhan ekonomi yang meningkat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah pembangunan sebuah negara berhasil atau tidak (Tambunan, 2016). Pertumbuhan ekonomi diinterpretasikan sebagai suatu proses

pertumbuhan output perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang, bahwa ketika keluaran perkapita meningkat, kesejahteraan meningkat, dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli barang dan jasa. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang mempertahankan stabilitas dan pemerataan secara teratur dan bertahap. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tujuan pembangunan nasional adalah untuk memungkinkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi memegang peran penting sebagai indikator kemajuan dan perkembangan suatu negara yang dinilai dengan jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh segenap unit usaha dalam suatu negara, atau merupakan total nilai barang & jasa akhir yang dihasilkan oleh ekonomi secara keseluruhan (BPS, 2020). Salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan menghitung produk domestik bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) (Yuliadi, 2019). Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 1 dekade terakhir:



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam periode 2012-2021

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan GDP Indonesia bermula tahun 2016 menunjukkan hasil fluktuatif. Tahun 2016, pertumbuhan menjangkau 5,03%. Peningkatan terjadi pada tahun 2017 yaitu 5,06%, tahun 2018 sejumlah 5,17%, dan 2019 mendapati penurunan sehingga menjadi 5,01%. Angka pertumbuhan ekonomi anjlok hingga memperoleh hasil -2,06% di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi virus corona dan pembatasan sosial, yang menghambat aktivitas perekonomian di Indonesia. Meskipun pandemi masih berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, menjangkau 3,70% pada 2021.

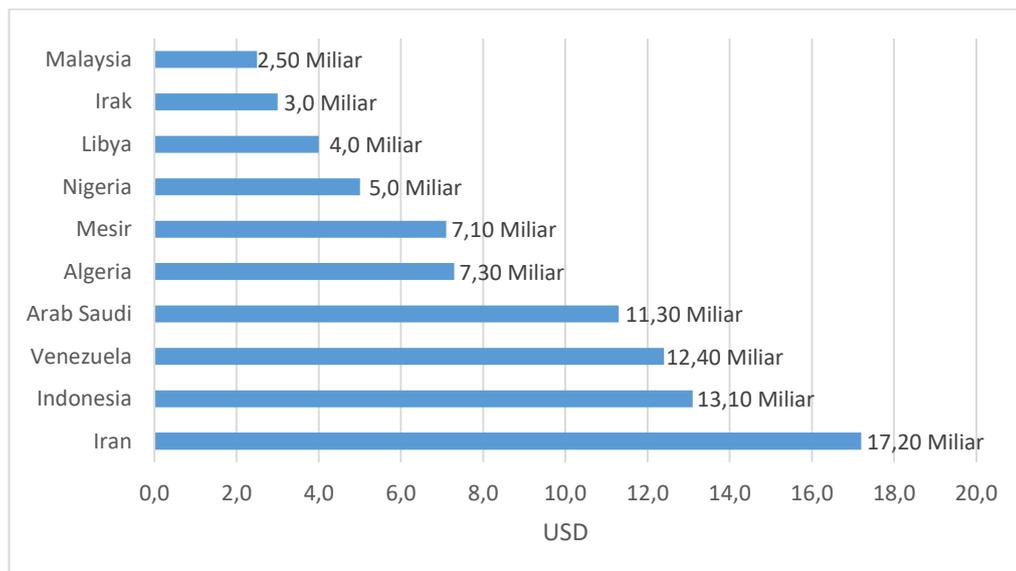
BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan komoditas strategis bagi perekonomian, baik di sektor rumah tangga, industri, transportasi, dan layanan publik lainnya. premium dan solar yang digunakan oleh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Di sektor industri, BBM seperti seperti minyak solar digunakan untuk pembangkit energi pabrik, dan khusus di sektor industri

transportasi, BBM merupakan komponen utama kendaraan transportasi. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM akan sangat berkaitan erat dengan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa di pasar.

Harga BBM dalam negeri dipengaruhi oleh harga minyak dunia sejak awal pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Selama periode pertama, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak global; namun, selama periode kedua, tingkat inflasi cenderung dipengaruhi oleh gejolak harga minyak. Peningkatan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi, yang disebabkan oleh kenaikan harga ekspor minyak bumi di seluruh dunia, merupakan salah satu faktor yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai saat ini, ketidakpastian yang terjadi dalam kenaikan harga bahan bakar minyak di seluruh dunia telah berdampak pada beban APBN yang bertanggung jawab untuk membayar subsidi kepada pengguna bahan bakar minyak. Akibatnya, pemerintah harus memilih antara menanggung subsidi yang meningkat atau menguranginya sebagai akibat dari meningkatnya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Ini disebabkan oleh Fakta bahwa Indonesia sekarang adalah negara pengimpor minyak neto dan bukan lagi anggota OPEC sejak tahun 2008.

Semenjak itu Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan minyaknya. Adanya kekayaan sumber daya minyak Indonesia dan keinginan pemerintah untuk memberi kesempatan kepada lebih banyak orang untuk menikmati keuntungan dari sumber daya ini, pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan subsidi BBM. Meskipun biaya

produksinya tinggi, harga minyak disubsidi lebih murah daripada harga ekonominya, meskipun pemerintah Indonesia masih mampu secara finansial pada saat itu, fenomena ini terus berlanjut sampai Indonesia menghadapi defisit minyak seperti saat ini. Pemerintah memberikan subsidi BBM sebagai bantuan dengan tujuan menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, serta insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Namun meningkatnya subsidi akan terus membebani APBN, apalagi subsidi BBM sebagian besar dinikmati orang-orang mampu.



Sumber: Katadata.com/International Energy Agency (IEA), 2021

Gambar 2. 10 Negara dengan Nilai Subsidi BBM Kendaraan Terbesar di Skala Global (2021)

Dari Gambar 2 menggambarkan jumlah besaran subsidi BBM kendaraan di skala global nilai subsidi BBM di seluruh dunia sepanjang tahun 2021 mencapai nilai USD 92,64 miliar. Dikutip dari International Energy Agency (IEA), nilai subsidi tersebut meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai sebesar USD 37,75 miliar. subsidi BBM pada peringkat pertama adalah Iran

dengan total USD 17,2 miliar diikuti Indonesia dengan jumlah total nilai subsidi 13,1 miliar. Hal tersebut berbanding terbalik negara sebelah Malaysia dimana nilai subsidinya hanya USD 2,5 miliar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki respon yang sama yaitu melakukan subsidi terhadap BBM, meskipun dengan nilai subsidi yang berbeda. Adanya issue kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada tahun 2022 dapat menyebabkan adanya beban subsidi BBM. Hal tersebut akan memicu kenaikan defisit anggaran atau dalam perspektif yang lebih luas akan memacu kesinambungan fiskal.

Melalui siaran pers yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral pada 19 Januari 2021 mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai cadangan minyak bumi yang tersedia hingga 9,5 tahun mendatang dan cadangan gas bumi mencapai 19,9 tahun. Selama beberapa dekade terakhir, harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus mengalami kenaikan. Mulai dari masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo, tren kenaikan harga BBM terus berlanjut, kecuali pada masa pemerintahan Presiden Habibie yang justru menurunkan harga BBM sebesar Rp 200 per liter (Nuri Aslami, 2022). Melihat kembali pada tahun 2012, harga minyak mentah mengalami penurunan akibat krisis, namun kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 97,85 US\$ per barel. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan permintaan minyak global dan penurunan pasokan minyak mentah dunia. Pada periode tahun 2014-2015, terjadi penurunan harga minyak dari 59,26 US\$ per barel menjadi 37,23 US\$ per barel, namun kemudian harga kembali meningkat pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2020-2021, terjadi peningkatan harga minyak yang dipicu oleh munculnya varian

baru virus Covid-19. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan aktivitas ekonomi dan permintaan minyak mentah global, serta mengharapkan OPEC menunda keputusan untuk meningkatkan produksi minyak. Besaran subsidi BBM juga dipengaruhi oleh harga minyak mentah dan konsumsi BBM bersubsidi (www.minerba.esdm.go.id).

Tabel 1
Kondisi Harga Minyak, Subsidi BBM, Tarif BBM, Jumlah Penduduk dan
Konsumsi BBM Indonesia

Tahun	Harga Minyak Mentah Dunia (US\$/barel)*	Subsidi BBM (Miliar Rupiah)**	Tarif Harga BBM Bersubsidi Rata-rata (Rp/liter)***	Jumlah Penduduk Indonesia (Jiwa)****	Konsumsi Energi BBM Indonesia (barell)*****
2012	88,22	306,479	3,833	242245673	363827000
2013	97,85	210,000	4,833	245551753	397223000
2014	59,23	239,994	6,166	252263638	396214000
2015	37,23	60,759	5,566	255549476	415342000
2016	52,01	44,620	5,05	258738372	436155000
2017	57,94	47,047	5,05	261904721	458748000
2018	48,95	97,015	5,05	265015300	483748000
2019	59,8	136,883	5,05	265916789	509721000
2020	47,05	13,622	5,05	270208543	538350000
2021	73,36	140,413	5,05	272634678	569262000

Sumber: *www.katadata.com, ** www.bi.go.id, *** Wikipedia.com,**** www.bps.go.id, ***** www.minerba.esdm.go.id

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengubah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menghapuskan subsidi langsung untuk premium dan solar. Sebagai gantinya, diterapkan program subsidi langsung tunai (BLT) yang memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang terdampak penghapusan subsidi tersebut (Coady, 2017). Penggantian kebijakan baru dilakukan untuk memperbaiki kebijakan yang lama (Nuri Aslami, 2022).

Tahun 2022 harga BBM naik disebabkan oleh pencabutan subsidi, dengan lima alasan yang diberikan. Pertama, subsidi digunakan dalam jumlah besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, subsidi dianggap mengurangi kemandirian masyarakat. Ketiga, subsidi diharapkan mengurangi penyelundupan BBM ilegal. Keempat, subsidi diklaim hanya dinikmati oleh kalangan atas. Dan kelima, subsidi dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya, subsidi BBM tidak benar-benar diberikan kepada rakyat, melainkan sebaliknya, rakyat yang sebenarnya memberikan subsidi kepada pemerintah (Zulhilmy, 2022). Pada bulan September 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa Presiden berusaha keras untuk mencegah masyarakat terjebak dalam gejolak harga minyak global. Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Pengalihan ini dilakukan untuk memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu untuk menjaga daya beli mereka sehingga konsumsi tetap berjalan yang nantinya akan meningkatkan produktivitas (www.kemenkeu.go.id).

Pencabutan subsidi BBM dapat meningkatkan anggaran untuk pembangunan tersebut, tetapi juga dapat menyebabkan lonjakan harga, peningkatan kemiskinan, dan dampak negatif pada industri dengan meningkatnya biaya produksi dan PHK massal. Perlu adanya keseimbangan dalam mengelola subsidi BBM untuk mencapai pembangunan yang merata dan menjaga stabilitas ekonomi (Hasan, 2018). Pro dan kontra mengenai subsidi BBM telah menjadi perdebatan. Pihak yang mendukung subsidi berpendapat bahwa ini dapat meningkatkan daya

saing industri, menerbitkan lapangan kerja, dan memangkas kemiskinan, serta mendesak pertumbuhan ekonomi. Namun, pihak yang menentang subsidi mengklaim bahwa subsidi BBM membebani anggaran, tidak tepat sasaran, mengancam ketahanan energi, dan dapat menyebabkan inflasi (Meliala, 2014).

Subsidi energi memiliki manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kelemahan. Harga yang disubsidi cenderung membuat konsumen tidak berhemat dan subsidi dapat tidak tepat sasaran. Subsidi dimaksudkan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa. Subsidi juga bermanfaat dalam membantu sektor produksi yang lemah dengan mengurangi biaya produksi melalui subsidi bahan bakar listrik atau mesin yang lebih terjangkau. Namun, konsumsi energi yang tinggi, terutama BBM, telah menimbulkan permasalahan di berbagai aspek seperti kemiskinan (Suryadi, 2015).

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan yang sangat penting dan telah menjadi permasalahan yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Saat ini kondisi kemiskinan menyebabkan penduduk Indonesia mendapati kesulitan dalam menutup kebutuhan hidup mereka (Martha Carolina, 2022). Peningkatan populasi, disparitas pendapatan, peningkatan pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang (Adhipramana, 2022). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. (Khairi, 2018).

Pemerintah mengandalkan anggaran belanja untuk mengatasi kemiskinan dan merumuskan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan. Anggaran pemerintah berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan alokasi anggaran negara menjadi kunci dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil (Delvia, 2020). Pemerintah serius menangani kemiskinan, terbukti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 dan Nomor 8 Tahun 2002, peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 dan Nomor 15 Tahun 2010 yang di keluarkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui strategi-strategi kebijakan yang masih aktif sampai sekarang (PSKK UGM, 2018).

Tabel 2
Garis Kemiskinan Makanan dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Garis Kemiskinan Makanan (Rp)			Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan +Pedesaan	Kota + Desa
2016	259886	270038	264941	27,76
2017	283220	284740	283964	26,58
2018	329220	299883	302022	25,67
2019	303909	320019	324911	24,79
2020	342356	335042	339003	27,55
2021	363836	355299	360007	26,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah) Tahun 2023

Tabel 2 menunjukkan data tentang garis kemiskinan dan jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga 2021. Pada tahun 2016, garis kemiskinan makanan adalah sebesar Rp259.886/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27,76 juta jiwa. Pada tahun 2021, garis kemiskinan makanan meningkat menjadi

Rp363.836/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 26,50 juta jiwa. Berdasarkan tabel, pada tahun 2016 garis kemiskinan makanan adalah Rp259.886/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27,76 juta jiwa, kemudian pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 24,79 juta jiwa. Namun, akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 27,55 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022).

Persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat dari tahun 2019 hingga 2020. Ini naik menjadi 10,14% pada tahun 2020. Setelah mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2019, kenaikan ini secara signifikan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini terjadi karena ketidakmampuan sebuah masyarakat untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan standar manusiawi. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas dan pendapatan. Meskipun demikian, kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pembangunan ekonomi, karena tujuan utama pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, pembagian pendapatan harus merata serta pertumbuhan ekonomi harus meningkat.

Selain itu, adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan pengangguran meningkat dikarenakan pemberlakuan PSBB di beberapa daerah yang menyebabkan sektor transportasi dan perdagangan mengalami penurunan yang signifikan, yang berakibat pada peningkatan tingkat pengangguran di daerah

perkotaan (Adinda Putri, 2021). Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran rata-rata di 34 provinsi Indonesia mencapai 6,03%, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode Februari tahun yang sama yang sebesar 4,46 (Ali Fikri, 2021; dan Rosmiati Sani, 2022).

Tabel 3
Data Tingkat Pengangguran

Keterangan	Agustus 2020	Februari 2021	Perubahan Ags 2020-Feb 2021	
	juta orang	juta orang	juta orang	persen
Pengangguran Karena Covid-19	2,56	1,62	-0,94	-36,72
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19	0,76	0,65	-0,11	-14,47
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	1,77	1,11	-0,66	-37,29
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	24,03	15,72	-8,31	-34,56
Total	29,12	19,1	-10,02	-34,41
Penduduk Usia Kerja (PUK)	203,97	205,36	1,39	0,68
	Persen	Persen	Persen Poin	
Persentase terhadap PUK	14,28	9,3	-4,98	

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang bekerja yang terdampak oleh COVID-19 pada bulan Februari 2021 adalah sebanyak 10,02 juta orang, mengalami penurunan sebesar 34,41% dibandingkan dengan bulan Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang harus menganggur akibat COVID-19 sebanyak 1,62 juta orang, sementara 0,65 juta orang bukan merupakan angkatan kerja (BAK) yang terkena dampak COVID-19. Selain itu, 1,11 juta orang harus

kehilangan pekerjaan sementara karena COVID-19, dan 15,72 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja akibat COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2020. Penurunan terbesar terjadi pada komponen angkatan kerja yang mengalami penurunan jadwal kerja akibat COVID-19 menjadi 8,31 juta orang (Ali Fikri, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Tingkat pengangguran mengacu pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan; ini didefinisikan sebagai rasio jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah total karyawan. Pengangguran dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ini karena pengangguran dapat memengaruhi produksi, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah, yang semuanya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Proses atau aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi.

Beberapa upaya dalam menangani pengangguran telah menarik perhatian para peneliti. Penelitian Kasanah et al. (2018) menggunakan data dari Jawa Tengah antara tahun 2009 hingga 2014 menunjukkan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Penelitian Nugroho (2016) menggunakan data di Indonesia antara tahun 1998 hingga 2014 menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah kemiskinan, dan inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran. Penelitian Agustiana (2020) mengindikasikan bahwa krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia di masa depan. Indiyani & Hartono (2020) melakukan kajian terkait penyebab

tingginya tingkat pengangguran selama pandemi, dan hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lemah selama pandemi berkontribusi pada peningkatan pengangguran.

Paritas daya beli adalah komponen tambahan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Madura (2000), teori paritas daya beli berpusat pada hubungan antara inflasi dan nilai tukar, yang berarti nilai tukar akan berubah secara bertahap untuk menunjukkan perbedaan inflasi antara dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen untuk membeli barang-barang domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli barang-barang asing. Dalam kaitannya dengan nilai tukar, jika tingkat inflasi di suatu negara tinggi, harga produk yang diproduksi di sana akan menjadi lebih mahal, membuat produk tersebut kurang kompetitif di pasar global. Sebaliknya, jika tingkat inflasi di luar negeri juga tinggi, impor barang dari negara lain akan lebih menguntungkan. Namun dari sudut pandang moneter, tingkat inflasi yang tinggi juga diikuti oleh peningkatan jumlah uang beredar karena dibutuhkan lebih banyak uang untuk transaksi. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan di pasar uang dan depresiasi nilai tukar. Ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi/dolar terapresiasi akhirnya pertumbuhan ekonomi akan menghadapi penurunan, dan sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka urgensi penelitian ini yaitu mengkritisi kebijakan subsidi pemerintah, apakah kebijakan subsidi BBM selama ini (1992-2021) mampu menanggulangi persoalan kemiskinan dan pengangguran serta mampu mendorong paritas daya beli masyarakat terhadap laju pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi Indonesia di jangka pendek maupun di jangka panjang. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap strategi kebijakan nasional Indonesia kedepan serta dapat mendorong pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Subsidi BBM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Paritas Daya Beli Masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Subsidi BBM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kemiskinan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh Paritas Daya Beli terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademik, sebagai sumber rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.
2. Bagi penulis, sebagai sarana dalam penerapan teori-teori yang didapatkan pada masa perkuliahan dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelas sarjana.
3. Bagi pembaca, sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat secara luas terutama yang tertarik dengan bidang ekonomi.